



**APEL GABUNGAN:** Ratusan pasukan gabungan dari Kopassus, Kostrad, Gegana Brimob, dan satuan lainnya mengikuti apel siaga pengamanan di halaman Benteng Vastenburg, Surakarta, Jawa Tengah, kemarin. Sebanyak 796 prajurit terlatih akan mengamankan jalannya pertemuan G-20 yang diikuti delegasi dari 14 negara selama tiga hari.

MI/WIDJAJADI

## KPK Ungkap Kejanggalan Novel

MANTAN penyidik KPK Novel Baswedan ngotot mengaku pernah ditemui Ketua KPK Firlil Bahuri di sebuah toilet sesuai ekspos perkara suap ekspor benih lobster pada 25 November 2020. Novel mengklaim bahwa Firlil meminta untuk tidak menyerang dalam pertemuan versinya itu. "Iya, benar, saya menyampaikan itu dalam keterangan saya sebagai saksi di PTUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) Jakarta," kata Novel melalui keterangan tertulis, Senin (4/7).

Menurut Novel, permintaan itu karena Firlil merasa diserang. Penangkapan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo diyakini sebagai bentuk penyerangan terhadap Firlil. "Pernyataan dari Firlil tersebut, yang bersangkutan merasa bahwa adanya OTT (suap ekspor benih lobster) tersebut menyerang yang bersangkutan," ujar Novel.

Pelaksana tugas (plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri menyebut ada sejumlah kejanggalan dalam pernyataan Novel. Pertama, soal keberadaan Firlil pada 25 November 2020. "Kami sudah jelaskan, bila OTT perkara di KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) itu tanggal 25 November 2020 dan Ketua KPK saat itu sedang dinas ke Kalimantan Utara," ujar Ali.

Ali mengatakan banyak orang yang melihat Firlil menghadiri acara di Kalimantan Utara. Bahkan, dokumentasi kunjungan kedinasan Firlil didokumentasikan di media massa. Kejanggalan lain ialah Firlil tidak mengikuti ekspos perkara suap ekspor benih lobster karena sedang ada di Kalimantan Utara sehingga tidak mungkin Novel bisa bertemu dengan Firlil yang tidak ada di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, saat itu.

"Kami juga sudah pastikan dalam dokumen berita acara ekspos perkara KKP itu dilaksanakan pada tanggal 25 November 2020 di sore hari dan Ketua KPK tidak hadir dalam ekspos dimaksud karena sedang dinas ke Kalimantan Utara," tutur Ali.

Selain itu, Firlil tidak ikut dalam konferensi pers penetapan tersangka kasus suap ekspor benih lobster. Konferensi pers dilakukan Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango dan Deputy Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto.

KPK menyangkan tuduhan Novel terhadap Firlil. Novel diminta berhenti memfitnah Firlil karena diyakini bisa membuat opini kontraproduktif di kalangan masyarakat. (Can/P-1)

## Sidang Lili Dijanjikan Berjalan Profesional

**Lili dilaporkan ke Dewas KPK karena diduga menerima beberapa fasilitas saat menonton Moto-GP di Mandalika. Dia diduga mendapatkan akomodasi hotel hingga tiket Moto-GP dari salah satu BUMN.**

CANDRA YURI NURALAM  
candra@mediaindonesia.com

WAKIL Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dikabarkan berupaya menyuap Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait pelanggaran etik. Suap itu dilakukan agar Dewas KPK mengikuti skenario penyelesaian dugaan pelanggaran etik dari Lili.

Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean meminta kabar itu dilaporkan. Dewas KPK

bakal menindaklanjuti kabar tersebut berdasarkan laporan resmi.

"Tolong kalau jelas informasinya, laporkan, biar kita usut," kata Tumpak.

Kabar upaya penyuaan itu berasal dari pemberitaan salah satu media. Dalam laporannya, Lili disebut ingin memanipulasi hasil pemeriksaan Dewas KPK dan membuat tiket Moto-GP dibeli dengan uangnya sendiri.

Tumpak mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Kabar penyuaan itu berembus menjelang Lili

menjalani sidang etik. "Informasi dari mana, tuh, kami tidak tahu," ujar Tumpak.

Anggota Dewas KPK Syamsudin Haris juga tidak mengetahui kabar itu. Persidangan etik Lili bakal tetap berjalan. "Saya juga enggak tahu (kabar Lili berupaya menyuap Dewas KPK)," tutur Syamsudin.

Seperti diketahui, Lili dilaporkan ke Dewas KPK karena diduga menerima beberapa fasilitas saat menonton Moto-GP di Mandalika. Dia diduga mendapatkan akomodasi hotel hingga tiket Moto-GP dari salah satu perusahaan BUMN. Persidangan Lili di Dewas KPK terkait laporan tersebut akan digelar hari ini. Sidang akan digelar secara tertutup dan hanya dibuka untuk umum saat pembacaan putusan.

### Berjalan profesional

Pelaksana tugas (plt) juru bicara

bidang penindakan KPK Ali Fikri meyakini sidang bakal berjalan dengan profesional. Sidang itu diyakini tidak akan terpengaruh dengan rumor Lili berupaya menyuap Dewas KPK.

Ali meyakini seluruh tahapan sebelum persidangan itu juga dilakukan secara independen. Dewas KPK dipastikan tidak melanggar kewenangannya berdasarkan Pasal 37 B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Dewas juga dipastikan bakal menyampaikan hasil persidangan ke publik sebagai prinsip akuntabilitas dan transparansi. Masyarakat diminta ikut mengawal persidangan tersebut.

"Mari kita hormati proses yang sedang berlangsung ini karena penegakan kode etik oleh Dewas adalah bagian untuk memperkuat pemberantasan korupsi KPK,"

tutur Ali.

Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana meyakini Lili Pintauli Siregar tak hanya melanggar etik dalam penerimaan fasilitas menonton balapan motor secara gratis itu.

"Mestinya, Kedepan Penindakan KPK dapat berjalan secara paralel guna mengusut potensi pidana yang melibatkan Saudari Lili."

Kurnia meminta Divisi Penindakan KPK berkoordinasi dengan Dewan Pengawas (Dewas) KPK. ICW yakin Lili bisa diproses hukum jika dugaan pelanggaran etik itu sudah masuk ke persidangan. "Ini menandakan Dewan Pengawas telah memiliki cukup bukti terkait dengan peristiwa dugaan penerimaan tiket perhelatan Moto-GP Mandalika," tutur Kurnia. (Can/P-1)



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
("RUPS TAHUNAN")  
PT. SIANTAR TOP TBK**

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tertanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK No. 15/2020"), Direksi PT Siantar Top Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan RUPS Tahunan, yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut:

**A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPS Tahunan**

Hari / Tanggal : Jum'at / 1 Juli 2022  
Waktu : 10.29 – 11.45 WIB  
Tempat : Verwood Hotel & Services Residence  
Jl. Raya Kupang Indah Surabaya 60189

Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut:

- Penyampaian dan Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris termasuk Laporan Keuangan yang memuat Neraca dan Pertanggungjawaban Laporan Laba Rugi; Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan penjelasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et discharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2022 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjadikan jaminan hutang harta kekayaan milik Perseroan sebagai jaminan hutang Perseroan di masa yang akan datang, baik kepada pihak Lembaga Keuangan Non-Bank dan Lembaga Keuangan Bank.
- Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II PT Siantar Top Tbk.

**B. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPS Tahunan, antara lain:**

Direksi: Komisaris:  
Direktur Utama : Bapak Armin Komisaris Utama : Ibu Juwita Wijaya

**C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan**  
Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 1.232.292.300 saham yang memiliki hak suara yang sah atau dari 1.310.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat**  
Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan Kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan Pendapat-pendapat terkait mata acara Rapat.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat**  
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

**F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan**

Nomor	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
1	1.232.292.300 saham 100 %	Nihil	Nihil	Nihil
2	1.232.292.300 saham 100 %	Nihil	Nihil	Nihil
3	1.232.292.300 saham 100 %	Nihil	Nihil	Nihil
4	1.232.292.300 saham 100 %	Nihil	Nihil	Nihil
5	1.232.292.300 saham 100 %	Nihil	Nihil	Nihil

**G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

**Keputusan Dalam Mata Acara Rapat Pertama:**

- Menyetujui Laporan Tahunan yang di sampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2021 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2021
- Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugianto Adi dan Rekan sekuat dengan laporan Kantor Akuntan Publik yang diterbitkan pada tanggal 9 Mei 2022, dengan Laporan Nomor 00083/3.0193/AJ.1/04/1286-11/N/2022 tersebut, Akuntan Publik telah memberikan opini wajar Tanpa Modifikasi;
- Memberikan penjelasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et discharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundanguan.

**Keputusan Dalam Mata Acara Rapat Kedua:**

- Menetapkan bahwa sesuai dengan Laporan Keuangan pada Tahun Buku 2021 yang telah disahkan, Laba Bersih untuk Tahun Buku 2021 tercatat sebesar Rp.617.574.000.000,- (Enam ratus tujuh belas miliar lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah).
- Menetapkan penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2021 sebagai berikut :
  - Sebesar Rp.150.000.000.000,- (Seratus lima puluh miliar rupiah) akan dialokasikan sebagai dana cadangan; dan
  - Sisanya dibagikan sebagai saldo laba ditahan Perseroan, untuk menambah modal kerja dan menunjang perluasan usaha perseroan.

**Keputusan Dalam Mata Acara Rapat Ketiga:**  
Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta menetapkan biaya audit dan persyaratan lainnya, termasuk untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti, apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan peraturan perundanguan.

**Keputusan Dalam Mata Acara Rapat Keempat:**  
a. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi sesuai dengan struktur, kebijakan dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.  
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris sesuai dengan struktur kebijakan dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

**Keputusan Dalam Mata Acara Rapat Kelima:**  
Menyetujui rencana Perseroan untuk menjadikan jaminan hutang atas harta kekayaan milik Perseroan sebagai jaminan hutang Perseroan di masa yang akan datang, baik kepada pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya.

**Keputusan Dalam Mata Acara Rapat Keenam:**  
Menyetujui baik Penyampaian dan menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Perseroan.

Sidoarjo, 5 Juli 2022  
Direksi Perseroan



ANTARA/INDIARTO EKO SUWARSO

**DIPERIKSA KPK:** Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso menjawab pertanyaan wartawan sesuai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, kemarin. Rahmat diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) yang sebelumnya telah menjerat kakak iparnya yang merupakan mantan Sekretaris MA Nurhadi sebagai terpidana.

## Belum Ada Pembahasan Pengganti Tjahjo Kumolo

KETUA DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menegaskan tidak ada pembahasan sosok pengganti Tjahjo Kumolo di internal partai. Termasuk sosok yang berpotensi bakal dipertimbangkan menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-Rebiro) ke selanjutnya.

"Kami enggak bicara seperti itu, ya, jadi enggak tau dominannya ke siapa, ya," kata Djarot, kemarin.

Menurut dia, penentuan pengganti Tjahjo merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ada juga pertimbangan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri karena Tjahjo merupakan kader partai.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga menegaskan tidak ada pembicaraan mengenai kekosongan kursi Menpan-Rebiro dengan partai-partai koalisi. "Tidak ada pembicaraan dan kita masih dalam suasana duka. Jadi, agak kurang elok membicarakan hal tersebut," ujar Airlangga.

Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menegaskan bahwa penggantian kursi menteri kabinet merupakan kewenangan dan hak prerogatif Pre-

siden Joko Widodo.

Di sisi lain, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengenang sosok Tjahjo Kumolo yang suka memberikan motivasi. "Saya pernah menjadi sekretaris beliau di fraksi, sama Mas Bambang Pacul waktu itu, terus kemudian waktu beliau jadi sekjen, kami juga membantu lini-lini partai melalui lembaga-lembaga fungsional partai dan itu menurut saya bagian cara beliau memberi ruang kepada generasi muda," kata Ganjar.

Menurut dia, Tjahjo merupakan sosok yang terbuka kepada siapa pun. Mantan Menteri Dalam Negeri itu kerap mendengarkan suara dari bawah.

Ganjar mengatakan Tjahjo profesional dalam bekerja, termasuk mencari tahu langsung kondisi di lapangan. Tjahjo kerap berkoordinasi untuk mengetahui isu-isu spesifik. "Terakhir menjadi Menpan-Rebiro, beliau sangat aktif mendorong reformasi birokrasi di daerah," ujar Ganjar.

Tjahjo Kumolo meninggal dunia di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta, pada Jumat (1/7), pukul 11.10 WIB. Tjahjo sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit tersebut sejak pertengahan Juni 2022. (Adn/Ant/P-1)

## Wakil Bupati Blitar Diperiksa Terkait Eks Sekretaris MA

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Bupati Blitar Santoso, kemarin. Dia diperiksa sebagai saksi atas dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. "Pemeriksaan dilakukan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi," kata pelaksana tugas (plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri.

KPK juga memanggil advokat Hardja Karsana Kosasih dan tiga pihak swasta, yakni Tonnu Wahyudi, Titin Marwati, serta Andrysan Sundo Hosea. Mereka semua diharap hadir memenuhi panggilan penyidik. Seperti diketahui, lembaga antikorupsi kembali membuka kasus baru atas dugaan korupsi pengurusan perkara di MA. Kasus itu terkait dugaan pencucian uang oleh Nurhadi.

Kasus tersebut merupakan pengembangan perkara. Lembaga antikorupsi membuka kasus itu karena banyaknya dugaan pencucian uang oleh Nurhadi.

Seperti diketahui, jaksa eksekusi Josep Wisnu Sigit, pada Rabu (6/1), telah melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) RI terhadap terpidana Nurhadi dengan cara memasukkannya ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin untuk menjalani hukuman penjara selama enam tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang dijalani. Nurhadi juga dijatuhi hukuman denda Rp500 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan kurungan selama tiga bulan.

Sebelumnya, KPK juga sudah memeriksa menantu Nurhadi, Rezky Herbiono. Dia dimintai keterangan untuk mendalami dugaan pencucian uang pengurusan perkara di MA. "Pemeriksaan dilakukan di LP Kelas I Sukamiskin," imbuh Ali Fikri.

Dalam kasus lain, KPK juga mengembangkan kasus dugaan suap yang menjerat Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy. Dia kini menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). "Selama proses penyidikan, dugaan perkara awal tersangka RL (Richard Louhenapessy)."

Dugaan pencucian uang itu diduga dilakukan selama Richard aktif menjabat sebagai Wali Kota Ambon. Beberapa barang yang dimiliki Richard diduga disamakan untuk menghindari permasalahan hukum. "Di antaranya, kesengajaan menyembunyikan maupun menyamarkan asal-usul kepemilikan harta benda dengan menggunakan identitas pihak-pihak tertentu," ujar Ali. (Azf/Can/P-1)